

MASYARAKAT PEDESAAN (RURAL COMMUNITY)

A. MASYARAKAT DESA DALAM TINJAUAN SOSIAL BUDAYA

Pengertian desa menurut kamus Poerwadarminta (1976) adalah:

“sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun;... 2 dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota);...”.

Desa menurut kamus tersebut terutama dalam arti fisik. Lain lagi dengan istilah desa dalam rembug desa, yang berarti fisik, masyarakat dan pemerintahannya. Istilah lain yang memiliki pengertian hampir sama adalah *village*. Menurut *The Random House Dictionary* (1968), *village* adalah:

“a small community or group of house in a rural area usually smaller than a town and sometimes incorporated as a municipality”

Definisi tersebut mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan masyarakat kecil adalah masyarakat di daerah masyarakat pedesaan. Masyarakat kecil disebut juga *rural community* yang diartikan sebagai masyarakat yang anggota-anggotanya hidup bersama di suatu lokalitas tertentu, yang seorang merasa dirinya bagian dari kelompok, kehidupan mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggungjawab bersama dan masing-masing merasa terikat pada norma-norma tertentu yang mereka taati bersama.

B. KARAKTERISTIK UMUM MASYARAKAT DESA

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak

berlaku". Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini masih sering ditemui. Setidaknya, ini menjadi salah satu wacana bagi kita yang akan bersama-sama hidup di lingkungan pedesaan.

1. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal:

- a. Secara ekonomi memang tidak mampu
- b. Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

2. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada:

- a. Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya
- b. Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap "asing"

3. Menjunjung tinggi "unggah-ungguh"

Sebagai "orang Timur", orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau "unggah-ungguh" apabila:

- a. Bertemu dengan tetangga
- b. Berhadapan dengan pejabat
- c. Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan
- d. Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi
- e. Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya

4. Guyub, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah "mendarah-daging" dalam hati sanubari mereka.

5. Lugas

"Berbicara apa adanya", itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain

karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran, itulah yang mereka miliki.

6. Tertutup dalam hal keuangan

Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi jika orang tersebut belum begitu dikenalnya. Katakanlah, mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.

7. Perasaan “*minder*” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masyarakat desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak omong.

8. Menghargai (“*ngajeni*”) orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai “*patokan*” untuk membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “*ngajeni*”.

9. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama ini sering mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program pembangunan di daerahnya.

Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. Contoh kecil: mahasiswa menjanjikan pertemuan di Balai Desa jam 19.00. Dengan tepat waktu, mereka telah *standby* namun mahasiswa baru datang jam 20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu.

10. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki di hampir seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah "*sambatan*". Unikinya, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan "*nyengkuyung*" atau bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya "*gawe*" atau hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip mereka: "*rug i sathak, bathi sanak*". Yang kurang lebih artinya: **lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara.**

11. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari warga.

12. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: tahlilan, rajaban, Jumat Kliwonan, dll

C. PERMASALAHAN MASYARAKAT DESA

1. Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah yang umum dialami oleh masyarakat desa. Aktivitas perekonomian yang rata-rata disektor pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti. Apalagi dari segi kepemilikan lahan, banyak masyarakat desa hanya menjadi buruh tani saja.

2. Kebudayaan

Adapun masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai cultural. Banyak budaya yang masuk kedalam desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas desa tersebut perlahan hilang.

3. Social

Masalah social yang umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang begitu berkembang. Selain itu filterisasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat desa cenderung konsumtif.

4. SDM (Sumber Daya Manusia)

Masalah sumber daya manusia di pedesaan tak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum maksimal membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah.

D. PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Pembangunan masyarakat desa mencakup berbagai pendekatan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Sebagai cabang dari pengembangan masyarakat, pendekatan-pendekatan ini memberi perhatian pada masalah-masalah sosial khususnya pengorganisasian masyarakat. Hal ini berbeda dengan bentuk lain dari pembangunan pedesaan yang fokus pada pekerjaan umum (misalnya jalan dan elektrifikasi pedesaan) dan teknologi (misalnya alat-alat dan teknik untuk meningkatkan produksi pertanian).

Pembangunan masyarakat pedesaan adalah penting di negara-negara berkembang di mana sebagian besar penduduk terlibat dalam pertanian. Akibatnya, berbagai metode

pembangunan masyarakat telah dibuat dan digunakan oleh organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembangunan internasional. Sebagian besar upaya untuk mempromosikan pembangunan masyarakat desa dipimpin oleh 'ahli' dari luar masyarakat seperti pegawai pemerintah, staf organisasi non-pemerintah dan penasihat asing. Hal ini telah menimbulkan perdebatan panjang tentang isu partisipasi, dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan mengenai keberlanjutan upaya tersebut dan sejauh mana orang-orang pedesaan - atau tidak - sedang diberdayakan untuk membuat keputusan sendiri.

1. Membangun Institusi Masyarakat Pedesaan Yang Mandiri.

Secara teknis BKKBN (1998) membedakan institusi masyarakat pedesaan, terdiri dari tingkat: dasar, berkembang, dan mandiri. Aspek penilaian didasarkan pada pengorganisasian, rutinitas pertemuan, kegiatan KIE dan konseling, pendataan, pelayanan masyarakat, dan upaya swadaya. Penilaian seperti ini hanya untuk memudahkan, terutama bagi pelaksana/pendamping kelompok masyarakat tersebut. Lebih dari itu, usaha pengelompokan tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan memilih kelompok yang manapun dapat dipergunakan sebagai media apa bagi program-program pembangunan masyarakat. Langkah yang sangat penting dalam proses pelibatan masyarakat itu adalah pembentukan kelompok. Melalui kelompok akan dibangun solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Hal-hal tersebut dapat pula merujuk kepada ajaran agama. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan agama atau kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama. Dengan bertolak dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama. Ini akan menimbulkan keasyikan dan motivasi tersendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program. Disini akan dijelaskan pengertian untuk bekerja secara sistematis. Dengan kerangka sistematis mereka akan bisa merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai

hasil kegiatan mereka. Mereka akan dijebol dari situasi kerutinan. Disinilah peran motivator luar yang berfungsi melakukan persiapan sosial menjadi penting. Persiapan sosial tidak lain adalah mengajak segenap anggota kelompok sasaran untuk mulai bersedia melakukan kegiatan mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusinya (Karsidi, 1997). Sebagai contoh, kelompok diminta untuk mendefinisikan hakekat kelompok, tugas dan kewajiban mereka. Kelompok ini tidak sekedar kelompok tanpa kemajuan, tetapi kelompok itu harus berkembang menuju kepada perkembangan dan kemajuan. Untuk itu para anggota bisa diminta untuk mendefinisikan tahap-tahap perkembangan kelompok sebagai langkah yang akan ditempuhnya. Tahap-tahap tersebut akan menjadi acuan program pengembangan kelompok dan anggota untuk mencapainya secara bersama-sama (Karsidi, 1998). Menurut Raharjo (1989) mendasarkan pada kelompok kepentingan ekonomi, ada tiga tahap kemajuan kelompok. Tahap pertama dapat disebut sebagai kelompok swakarsa, kemudian kelompok swakarya dan terakhir adalah kelompok mandiri. Pembentukan dan pengembangan kelompok kerja masyarakat adalah basis dari strategi pembangunan dari bawah. Dari kelompok-kelompok itu diharapkan akan timbul dinamika dari bawah. Dalam prinsip partisipasi menurut Raharjo (1989) terdapat tiga unsur penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran adalah sumber motivasi, tapi motivasi itu perlu didukung dengan kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis. Berbekal kepada tiga hal itulah maka kelompok bisa mencari kesempatan. Kesempatan disini bukanlah semata-mata kesempatan yang berasal dari luar atau dari atas, melainkan kesempatan yang diciptakan sendiri. Dasar utamanya adalah gagasan yang rasional praktis. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang sebenarnya sudah banyak tersedia dimasyarakat.

2. Program Pendidikan Nonformal Untuk Masyarakat Pedesaan

Antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal telah saling melengkapi. Output pendidikan formal (sekolah) dari berbagai jenjang yang kurang memiliki keterampilan, sebagian dapat dilengkapi dengan keterampilan untuk dapat bekerja

pada instansi negeri dan swasta, atau mengembangkan usaha mandiri (wirausaha). Selain itu mereka yang putus sekolah dan tidak sempat mengikuti pendidikan formal diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan nonformal (program pendidikan life skill) sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Bersamaan dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan nonformal, terdapat masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi atau ditanggulangi dalam pembangunan selanjutnya. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah masalah pemerataan pendidikan. Dalam hal ini diakui bahwa masyarakat pedesaan terutama masyarakat terpencil dan terisolir masih belum terjangkau pendidikan termasuk pendidikan nonformal. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian, sehingga kualitas dan taraf hidupnya dapat ditingkatkan. Tentu saja keberadaan mereka perlu diketahui sehingga dapat dirancang program-program pendidikan nonformal yang relevan dengan kebutuhan belajar mereka

PERMASALAHAN

1. Masyarakat desa memiliki bahasa lokal yang masih digunakan dalam pergaulan hidup. Bagaimana upaya pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan melalui bahasa lokal mereka sekaligus melestarikan bahasa lokal sebagai aset budaya bangsa
2. Sebagian masyarakat desa hidup di daerah terpencil/ terisolir. Hal ini merupakan persoalan untuk dijangkau dengan program pendidikan nonformal
3. Kebutuhan belajar masyarakat desa beraneka ragam, namun belum diketahui secara jelas sehingga sulit untuk merancang program-program pendidikan nonformal yang relevan dengan kebutuhan belajar mereka
4. Potensi alam masyarakat desa cukup banyak dan bervariasi, Namun terbatas kemampuan/ keterampilan warganya untuk memanfaatkan secara produktif.

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN

1. Program Riset.

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan dengan lingkungan yang memiliki potensi alam yang melimpah, lagi pula pembangunan pedesaan menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian besar dan lebih serius terhadap pembangunan desa. Sekalipun kemajuan dalam pembangunan desa telah banyak dirasakan manfaatnya, namun masih banyak pula masalah-masalah yang perlu dipecahkan untuk lebih memantapkan pembangunan desa. Khususnya dari segi peningkatan dan pemerataan pendidikan nonformal perlu ditemukenali aspek-aspek mendasar dari kehidupan masyarakat desa sebagai subyek (warga belajar). Untuk maksud itu setiap lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan nonformal pada masyarakat pedesaan perlu melaksanakan kegiatan penelitian secara mendalam dan luas. Menyadari akan kepincangan-kepincangan yang ada di daerah pedesaan, maka program riset dalam rangka pelaksanaan pendidikan nonformal bagi masyarakat pedesaan merupakan satu kebutuhan. Salah satu jenis penelitian yang akurat dan cepat hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan adalah action research. Untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihadapi masyarakat desa perlu dikembangkan jenis penelitian ini.

2. Program Pendidikan nonformal dengan Menggunakan Bahasa Ibu

Masyarakat pedesaan terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa lokal masing-masing, ingat saat ini masih digunakan secara lisan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pesan-pesan pendidikan nonformal akan lebih mudah dan cepat dihayati dan dimengerti oleh masyarakat apabila disampaikan dalam bahasa lokal atau bahasa ibu mereka. Selain itu, dengan menggunakan bahasa ibu dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan nonformal, sekaligus dapat melestarikan bahasa ibu guna memperkaya kebudayaan nasional. Hasil

penelitian Jim Cummis (2005) menjelaskan bahwa anak-anak yang kuat akan lebih dapat membangun kemampuan keaksaraan mereka dalam bahasa yang digunakan di tempat pendidikan. Jika orang tua dan pengasuh lainnya (misalnya kakek atau nenek) bisa meluangkan waktu dengan anak-anak mereka, serta bercerita atau mendiskusikan masalah tertentu sehingga dapat mengembangkan keaksaraan dalam konsep bahasa ibu mereka, maka anak-anak bisa lebih siap untuk mempelajari bahasa di tempat pendidikan, dan berhasil dalam pendidikan mereka. Pengetahuan dan keterampilan mereka dialihkan dari bahasa ibu yang telah mereka pelajari di rumah ke dalam bahasa yang digunakan di tempat pendidikan. Dari sudut pandangan pengembangan konsep dan keterampilan berfikir anak-anak, kedua bahasa ini saling bergantung satu sama yang lain. Pengalihan lintas bahasa terjadi secara dua arah, jika bahasa ibu dipromosikan di sekolah (misalnya dalam program pendidikan dwibahasa) maka konsep kemampuan berbahasa dan ketrampilan keaksaraan yang dipelajari oleh anak-anak dalam bahasa ibu mereka. Singkatnya kedua bahasa itu bisa saling terpelihara jika lingkungan pendidikan mendukung anak-anak untuk menggunakan dua bahasa. Dengan pendekatan bahasa ibu dalam proses pembelajaran, peluang untuk keberhasilan cukup tinggi karena yang dipelajari adalah ucapan, kata-kata yang setiap saat muncul di dalam kehidupan baik dalam proses sosial, ekonomi maupun proses budaya. Pemahaman makna yang dipelajari akan lebih mudah dimengerti karena kata-katanya sudah menjadi bagian tentang apa yang telah dikerjakan atau dilakukan dalam kehidupannya. Manfaat yang didapatkan dari pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu (bahasa rimba) adalah:

- a. Bisa menjadikan lebih cepat akrab dengan warga belajar
 - b. Bisa mempelajari dan memahami struktur bahasa warga belajar
 - c. Warga belajar dapat melestarikan adat mereka
 - d. Memotivasi pada warga belajar untuk menularkan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung kepada generasi berikutnya.
3. Program Radio Siaran Pendidikan Nonformal

Kegiatan dan peristiwa pembelajaran, khususnya pendidikan nonformal perlu diusahakan melalui berbagai alternatif program strategis yang bervariasi dan inovatif, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan ketepatan belajar setiap warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perluasan dan pemerataan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu alternatif pembelajaran pendidikan nonformal yang cukup strategis dan inovatif adalah saluran media. Melalui media pesan atau bahan belajar dapat dikomunikasikan secara efektif untuk merangsang pikiran, sehingga terdorong untuk belajar secara optimal. Radio sebagai salah satu media dengar, cukup efektif terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang sulit menjangkaunya (terpencil / terisolir). Hal itu dapat dipahami karena masyarakat terpencil sulit dijangkau secara langsung melalui media cetak dan media visual (televisi), yang dapat diusahakan dan dimiliki masyarakat terpencil / terisolir adalah radio. Untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pendidikan nonformal secara luas kepada masyarakat, terutama yang hidup di daerah terpencil / terisolir, sangat diperlukan radio siaran pendidikan nonformal.

4. Program Lab-site Pendidikan Nonformal.

Bila dikaitkan dengan kebutuhan belajar masyarakat pedesaan, maka perlu dirancang uji coba model-model pembelajaran pendidikan nonformal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan uji coba ini lebih intensif bila dilaksanakan pada suatu wilayah / lokasi yang dirancang khusus sebagai lab-site PNF. Selain itu pelatihan bagi para tenaga tutor dan pembelajaran warga masyarakat akan lebih berhasil bila diselenggarakan pada lab-site PNF. Dengan demikian sangat diperlukan suatu lab-site PNF yang akan berfungsi sebagai tempat praktek atau tempat rintisan program-program PNF dan tempat latihan bagi tutor-tutor dalam membelajarkan warga belajar. Memahami kondisi warga masyarakat pedesaan dalam berbagai dimensi kehidupannya merupakan suatu keharusan bagi para pemerhati, pemikir dan praktisi pendidikan nonformal.

Warga masyarakat pedesaan sebagai bagian dari komunitas penduduk yang memerlukan layanan pendidikan nonformal, hendaknya mendapat perhatian, dengan cara memberikan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan belajarnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata bagi mereka, antara lain melalui program riset, program pendidikan nonformal yang menggunakan bahasa ibu. Program radio PNF dan program lab-site PNF, merupakan program yang disajikan hanya merupakan bagian kecil dari program-program yang dapat menyentuh kebutuhan mendesak bagi warga masyarakat pedesaan, sehingga pengembangan model-model pembelajaran perlu terus dilakukan.

3. Efektivitas Penggunaan Media Rakyat Pada Masyarakat Pedesaan Dalam Mendukung Otonomi Daerah

Kemajuan teknologi yang sangat pesat dewasa ini telah merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena teknologi yang semakin mutakhir tersebut menawarkan berbagai kemudahan serta gaya hidup baru yang terkadang justru meninggalkan pola-pola lama yang bersifat tradisional. Tidak dapat kita bayangkan betapa sepiunya dunia ini tanpa kehadiran TV, radio, surat kabar, juga internet yang belakangan ini mulai digandrungi masyarakat, terbukti dengan menjamurnya warung-warung internet baik di kota besar maupun kota-kota kecil. Dengan biaya yang relatif murah kita dapat menjelajahi dunia hanya dengan duduk di depan monitor. Belum lagi teknologi komunikasi yang lain seperti faksimili, telepon genggam, dan lain-lain yang demikian mewabah.

Sementara di sisi lain, di negara kita yang tercinta yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup di ladang-ladang pertanian, serta tersebar ke ribuan pulau yang membentang dari Sabang-Merauke, terkadang masih mengalami kesulitan dalam menyebarkan informasi, khususnya informasi pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil pertaniannya. Demikian juga untuk masyarakat nelayan, seringkali informasi tentang perkembangan teknologi kelautan sangat terlambat diantisipasi karena

kurangnya informasi yang diterima. Bahkan informasi tentang ditangkapnya banyak nelayan kita karena dianggap melewati perbatasan negara tetangga bisa jadi karena faktor ketidak tahuan akan informasi batas ekonomi kelautan.

Format pembangunan Indonesia yang khas negara sedang berkembang, dengan ciri khas penentuan kebijakan ada pada pusat pemerintahan dan nihilnya partisipasi masyarakat membuat pembangunan menjadi hanyalah *lips services* untuk para penguasa. Sementara sisi kemanfaatannya yang nyata kepada masyarakat boleh dikatakan hampir tidak terasa. Akibatnya, tanpa dukungan masyarakat yang merasa tidak terlibat, terjadilah gap yang sangat jauh antara masyarakat pedesaan atau lingkup masyarakat tradisional dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini, mengakibatkan ketidak berimbangan antara banyaknya informasi yang disampaikan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang semakin canggih dibandingkan proses penerimaan informasi tersebut kepada masyarakat luas, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan atau tradisonal.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, penggunaan media informasi pembangunan dari pusat ke daerah menjadi hal yang sangat penting. Sayangnya, sekali lagi akses informasi yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dijangkau oleh mereka yang berada di pedesaan. Baik karena latar belakang pendidikan, sosial budaya dan ekonomi. Di lain pihak penggunaan penyuluhan sebagai sarana penyampai informasi sudah perlu diberi koreksi dan revisi, selain memang masyarakat sendiri sudah mulai menentang keefektifitasannya. Akhirnya, jangankan tahap implementasi otonomi daerah yang harus segera dilaksanakan, pengertian tentang otonomi daerah perlu disosialisasikan ulang dan terus menerus. Banyak contoh kasus sekarang ini karena faktor ketidak mengertian apa itu otonomi daerah adalah banyak daerah yang menyetujui diberlakukan otonomi daerah dengan anggapan sumber keuangan daerah yang selama ini menjadi target utama pembangunan daerah selalu dilarikan ke atas (pusat), bakal menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Ternyata kenyataan berlangsung lain, karena alasan anggaran mepet atau tidak mencukupi daerah yang sebelumnya getol menyuarkan segera diberlakukan otonomi daerah menjadi mengeluh dan ujung-ujungnya meminta

penangan pusat. Otonomi daerah memang dituntut untuk menjadikan suatu daerah mandiri baik secara ekonomi juga hal lainnya.

Memaksa masyarakat menjadi pengguna teknologi komunikasi dan informasi maju hanya akan menjadikan masalah baru. Tanpa dukungan pemahaman dan pendidikan yang betul justru akan dikhawatirkan memunculkan beragam masalah baru. Seperti ideologi baru yang serba permisif, atau runtuhnya nilai budaya timur yang sarat dengan makna dan nilai. Bahkan termasuk mereka yang sudah berpendidikan pun di kota-kota besar. Contoh nyata adalah pengakses situs pornografi terbesar di dunia, Indonesia merupakan rangking 4. Untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan pengakses terbesarnya (HU Suara Merdeka, 7 Mei 2002). Tentu saja tanpa proses pengetahuan dan pemahaman yang betul justru yang terjadi adalah penjerumusan ke dalam kesalahan besar berikutnya.

Disinilah perlu diupayakan mencari sebuah pendekatan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat khususnya pedesaan secara tepat. Membiarkan mereka tanpa informasi yang memadai juga akan berpengaruh negatif, karena jarak sosial dengan masyarakat perkotaan akan semakin jauh. Sedangkan membiarkan mereka mengakses informasi juga akan berpengaruh yang negatif pula. Dari sinilah, penelitian tentang penggunaan media yang selama ini ada pada masyarakat pedesaan penting untuk mendapat perhatian khusus. Mereka tidak perlu mencari sesuatu yang baru, tetapi harus menghidupkan media informasi yang tepat digunakan untuk mampu menerima informasi dari pemerintah khususnya tentang pembangunan. Karena pada saat otonomi daerah diberlakukan tuntutan untuk mandiri pada masyarakat menjadi sebuah kewajiban. Dan media rakyat ini, juga dapat dijadikan sarana yang tepat untuk menjadi corong pemerintah sebagai media penyampai pesan kepada masyarakat pedesaan.

Media Rakyat

Pada masyarakat pedesaan dimana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif saling berinteraksi. Media ini telah sejak lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi

media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat.

Media sosial adalah wahana komunikasi atau pertukaran informasi yang telah terpola dalam kehidupan sosial suatu komunitas masyarakat. Media sosial menuntut keterlibatan secara fisik individu dalam proses komunikasi (Sigman;124). Media sosial menggunakan komunikasi tatap muka dalam bentuk komunikasi antar personal maupun komunikasi kelompok. Disini proses keterlibatan anggota menjadi sangat penting. Media rakyat ini digambarkan sebagai media yang murah, mudah, bersifat sederhana, dialogis, sesuai dan sah dari segi budaya, bersifat setempat, lentur menghibur dan sekaligus memasyarakat juga sangat dipercaya oleh kalangan masyarakat pedesaan yang kebetulan menjadi kelompok sasaran utama (Oepen;hal 88).

Media rakyat sering muncul dalam bentuk kesenian daerah atau kebudayaan tradisional daerah. Kesenian atau budaya daerah digunakan sebagai wahana untuk memperkenalkan dan memberikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat pedesaan. Karena warga masyarakat pedesaan masih menyukai dan membutuhkan budaya atau kesenian tradisional sebagai sebuah bentuk hiburan maka media ini juga menjadi sarana yang sangat tepat sebagai media transformasi nilai-nilai, termasuk pesan-pesan pembangunan dari pemerintah. Pesan-pesan pembangunan disisipkan secara implisit dan kreatif sehingga terasa menyatu dengan media rakyat (Yuni Setyaningsih ;2000).

Ada banyak macam media rakyat yang selama ini tumbuh, berkembang di masyarakat, namun banyak pula yang hilang karena ditinggalkan penggemarnya dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Pemilihan media rakyat yang mana yang bisa digunakan untuk menyebar luaskan ide-ide pembangunan adalah sangat penting untuk mendukung efektifitas pesan. Pilihan hendaknya di jatuhkan pada media rakyat yang paling disukai oleh sebagian besar masyarakat setempat (Colleta dan Kayam ; hal 235).

Media rakyat dalam bentuk seni rakyat (*folk culture*) diyakini dapat lebih mudah digunakan sebagai sarana menyebar luaskan informasi pembangunan karena media

tersebut telah ada dan dekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan media rakyat, masyarakat akan ikut serta merasa memiliki atau terlibat dalam pembuatannya, sehingga memungkinkan tersampainya pesan-pesan pembangunan secara lebih efektif. Induksi nilai-nilai yang sifatnya evolutif dan menyatu dengan masyarakat dapat membuat masyarakat merasa tidak dipaksa untuk mengadopsi nilai-nilai baru.

Upaya penyebaran informasi pembangunan yang disampaikan melalui media melalui media yang ada bagi setiap masyarakat bangsa berbeda-beda disebabkan oleh struktur dan sistem masyarakat yang berbeda pula. Bagi masyarakat bangsa yang sudah linier dalam arti pengertian berbagai masalah sudah diketahui dan dimiliki oleh bagian terbesar anggota masyarakat, komunikasi melalui media massa modern akan lebih menguntungkan, namun bagi masyarakat yang mempunyai struktur dan sistem sosial yang majemuk, penyebaran informasi melalui media massa masih memerlukan upaya dengan media tradisional yang ada dalam masyarakatnya (Rogers 1971 : 165).

Dalam komunikasi tradisional di pedesaan, penggunaan pertunjukan rakyat sebagai media komunikasi mempunyai potensi besar untuk mencapai rakyat banyak, terutama sekali karena media tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat dan berakar di tengah-tengah masyarakat. Media tradisional merupakan alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (bersifat lokal) yaitu sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu. Media ini akrab dengan massa khalayak, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan berbiaya rendah. Media ini dengan segala kelebihanannya memiliki potensi yang dimiliki oleh pertunjukan rakyat dan sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, apalagi ketika dikhususkan pada saat otonomi daerah diberlakukan.

Bila melihat tujuan komunikasi pembangunan yang tidak sekedar bagaimana terciptanya perubahan sikap, pendapat atau perilaku individu atau kelompok, melainkan perubahan masyarakat atau perubahan sosial (AS Achmad : 1997). Untuk itu, diperlukan berbagai sarana yang bisa memerankan posisi yang sangat penting tersebut, termasuk penggunaan media rakyat tradisional yang sudah ada. Disini,

pemerintah diharapkan tanggapan yang positif untuk memelihara dan mempertahankan setiap media rakyat ini bukan sekadar digunakan untuk fungsi hiburan masyarakat saja, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam tujuan pembangunan nasional di negara kita.

4. Pengertian Pendidikan dan Manfaat Pendidikan bagi Masyarakat Pedesaan serta Kendala pada Bidang Pendidikan

Pada dasarnya, pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat serta menjadikan masyarakat pedesaan lebih terbuka dan akses terhadap pendidikan. Seiring perkembangan zaman, pengertian pendidikan pun mengalami perkembangan. Sehingga, pengertian pendidikan menurut beberapa ahli (pendidikan) berbeda, tetapi secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan lainnya. Bahkan, telah disebutkan pula pengertian pendidikan berdasar UU Nomor 20 tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini diperkuat pula oleh UU Nomor 2 tahun 1989, yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Manfaat Pendidikan Bagi Masyarakat Pedesaan

Manfaat pendidikan bagi masyarakat pedesaan sebagai instrumen pembebas, yakni membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan,

kebodohan, dan penindasan. Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya berfungsi pula sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat desa khususnya guna menghadapi masa depan. Pendidikan difokuskan melalui sekolah, pesantren, kursus-kursus yang didirikan di pedesaan yang masyarakatnya masih 'buta' akan ilmu. Masyarakat pedesaan yang terberdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga jelas, peranan pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dan haruslah terpenuhi bagi masyarakat pedesaan dalam manfaat lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

Kendala Pada Bidang Pendidikan

Salah satu kendala yang telah disadari oleh pemerintah dalam bidang pendidikan di tanah air adalah kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses terutama pendidikan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran masyarakat di desa sangat kurang dan tidak antusias serta memahami akan pentingnya pendidikan. Selain itu, kendala lain negara berkembang termasuk Indonesia, untuk masa yang lama menghadapi empat hambatan besar dalam bidang pendidikan, yaitu:

- 1) Peninggalan penjajah dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah,
- 2) Anggaran untuk bidang pendidikan yang rendah dan biasanya kalah bersaing dengan kebutuhan pembangunan bidang lainnya,
- 3) Anggaran yang rendah biasanya diarahkan pada bidang-bidang yang justru menguntungkan mereka yang relatif kaya,
- 4) Karena anggaran rendah, dalam pengelolaan pendidikan biasanya timbul pengelolaan yang tidak efisien. Hal ini terlihat dimana pemerintah tidak saja mampu merancang penerapan kebijakan yang disukainya, tetapi juga menafsirkan ulang teks kebijakan sesuai preferensi kebijakannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Dimana kebijakan disetujui, diterima, dan dilaksanakan oleh pranata pemerintah.

Pendidikan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan sudah mengenali pendidikan pada saat jaman penjajahan, hanya saja pendidikan ini sulit diakses bagi tiap masyarakat terutama yang berdomisili di pedesaan, karena selain masalah biaya dan status sosial yang dipandang 'rendah' Beragam upaya yang dilakukan dalam mengusahakan pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat pedesaan khususnya, juga dilakukan gebrakan dengan mengumumkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan terpadu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada akhir lima tahun yang akan datang. Upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian yang tinggi pada bidang pendidikan, menempatkan manusia tidak hanya sebagai sasaran, tetapi terlebih sebagai aktor yang sangat penting peranannya. Aktor, masyarakat yang miskin ini harus mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga menambah masyarakat berpengetahuan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Program untuk menanggulangi kemiskinan bagi aktor-aktor yang tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonominya sangat rendah harus dirancang dengan menempatkan aktor yang bersangkutan sebagai titik sentral utamanya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, mendorong pula pemerintah untuk mencanangkan kewajiban belajar 9 tahun bagi seluruh rakyatnya demi memajukan kehidupan sosial pedesaan dan nasional, dimana dalam pencapaiannya membutuhkan kerjasama antara keluarga dan masyarakat untuk berperanserta bersama Pemerintah dalam mewujudkan berlakunya wajib belajar 9 tahun seawal mungkin dalam periode Pelita VI. Pencanaan wajib belajar 9 tahun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No.2 Tahun 1989, bahwa "Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah, yang berlaku juga dalam hal pembiayaan". Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka umum (legal framework) yang kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan, bahwa "Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan

yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”.

5. Mensejahterakan Masyarakat Pedesaan Dengan Hutan Desa

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutnan berdasarkan usulan bupati/walikota.

Untuk dapat mengelola hutan desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami adalah hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan, karena itu dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari.

Lembaga Desa yang akan mengelola hutan desa mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui bupati/walikota. Apabila disetujui, hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap lima tahun sekali.

Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan Ijin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dalam Hutan Desa. Dan apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Namun dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman. Selain itu pemungutannya dibatasi paling banyak 50 m³ tiap lembaga desa per tahun.

Dengan mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Namun untuk di hutan lindung tidak diijinkan memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu.

Dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.

Hasil identifikasi desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan tahun 2007 yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Biro Pusat Statistik di 15 propinsi, yaitu Sumut, Sumbar, Riau Sumsel, Bangka Belitung, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sultra, dan Maluku, terdapat 31.957 desa. Dengan rincian 1305 desa terdapat di dalam kawasan, 7943 berada di tepi kawasan hutan, dan 22709 berada di luar kawasan hutan.

Dengan hasil identifikasi ini, ke depan diharapkan penerbitan Peraturan Menteri tentang Hutan Desa ini dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, gonjang-ganjing mengenai peningkatan taraf hidup petani di pedesaan selalu mengalami dinamika. Apapun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakan petani sebagai "wong cilik" yang kehidupannya semakin tertindas dan harus menjadi tumbal atas kebijakan perekonomian pemerintah. Kita lihat kembali bagaimana kebijakan penentuan harga dasar gabah, pengurangan subsidi pupuk, mahalnnya harga bahan bakar dan baru-baru ini kebijakan import yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan petani.

Disisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang antara kota dan desa. Sangat disadari, negara berkembang seperti Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri yang membutuhkan investasi yang mahal untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian dikorbankan yang akhirnya pembangunan hanya terpusat di kota-kota. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan awal pertumbuhan diikuti dengan pemerataan yang buruk dan setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut pemerataan semakin membaik. (Todaro, 2000) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan (Arndt, 1988).

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Studi mengenai kemiskinan pedesaan oleh Sarman dan Sajogyo (2000) menunjukkan

bahwa untuk daerah pedesaan di Sulteng mencapai 48,08% sementara untuk perkotaan sekitar 12,24%. Studi ini menggunakan pendekatan jism (kajian bersama) sehingga kriteria kemiskinan sangat lokalistik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat.

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek.

Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Telaah lebih lanjut paper ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian

seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan.